

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

### **IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH TRIWULAN I**

Hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh KSP Kementerian Pertanian dan BMKG ada beberapa daerah kabupaten/kota yang berisiko tinggi mengalami gangguan tanam dan panen akibat dari curah hujan yang tinggi dan banjir.

Selain itu menjelang Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan, berpengaruh terhadap harga bahan pangan di pasaran.

Provinsi Jambi merilis daerah setempat mengalami inflasi pada Januari dikarenakan kenaikan harga beras, cabai merah dan bawang merah dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Januari 2024 terdapat fenomena unik yang mempengaruhi inflasi di Kota Jambi, dimana terjadi inflasi pada komoditas – komoditas yang berhubungan dengan industri.

Pada Triwulan I di tahun 2024, adanya kenaikan di berbagai komoditas dikarenakan pada bulan Maret adanya hari besar keagamaan yaitu puasa dan menjelang Idul Fitri.

### **IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH TRIWULAN II**

Kabupaten Bungo dihadapkan pada tantangan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih di datangkan dari daerah lain mengingat lahan di Kabupaten Bungo sebagian besar merupakan lahan perkebunan.

Klasifikasi permasalahan :

- Ketersediaan pasokan : – Perubahan cuaca yang mengganggu hari produksi pangan sehingga menuntut pengaturan pola tanam dan pemanfaatan teknologi pangan, Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian sehingga produksi pangan semakin menurun.
- Keterjangkauan harga : – Resiko gejolak harga pada musim hari raya
- Kelancaran distribusi : – Hampir sebagian besar kebutuhan pangan Kabupaten Bungo didatangkan dari luar daerah terutama dari daerah Kerinci, Padang dan Bengkulu, sehingga kelancaran distribusi sangat berpengaruh
- Komunikasi efektif : – Belum pahamnya sebagian masyarakat tentang pentingnya pengendalian inflasi perlu dilakukan peningkatan edukasi.

### **IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH TRIWULAN III**

Kabupaten Bungo dihadapkan pada tantangan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih di datangkan dari daerah lain mengingat lahan di Kabupaten Bungo sebagian besar merupakan lahan perkebunan.

Klasifikasi permasalahan :

- Ketersediaan pasokan : fluktuasi harga bahan pokok. Untuk beberapa komoditas di

beberapa wilayah di Kabupaten Bungo sebenarnya sudah bisa diupayakan sendiri seperti cabai. Nyatanya di pasar masih mengalami turun naik harga seperti bawang-bawangan dan cabai-cabaian.

- Keterjangkauan harga : – Resiko gejolak harga pada musim hari raya
- Kelancaran distribusi : – Hampir sebagian besar kebutuhan pangan Kabupaten Bungo didatangkan dari luar daerah terutama dari daerah Kerinci, Padang dan Bengkulu, sehingga kelancaran distribusi sangat berpengaruh
- Komunikasi efektif : – Belum pahamnya sebagian masyarakat tentang pentingnya pengendalian inflasi perlu dilakukan peningkatan edukasi.

#### **IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH TRIWULAN IV**

Kabupaten Bungo dihadapkan pada tantangan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih di datangkan dari daerah lain mengingat lahan di Kabupaten Bungo sebagian besar merupakan lahan perkebunan.

Klasifikasi permasalahan :

- Ketersediaan pasokan : – Perubahan cuaca yang mengganggu hari produksi pangan sehingga menuntut pengaturan pola tanam dan pemanfaatan teknologi pangan, Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian sehingga produksi pangan semakin menurun.
- Keterjangkauan harga : – Resiko gejolak harga pada musim hari raya
- Kelancaran distribusi : – Hampir sebagian besar kebutuhan pangan Kabupaten Bungo didatangkan dari luar daerah terutama dari daerah Kerinci, Padang dan Bengkulu, sehingga kelancaran distribusi sangat berpengaruh
- Komunikasi efektif : – Belum pahamnya sebagian masyarakat tentang pentingnya pengendalian inflasi perlu dilakukan peningkatan edukasi.

Berikut catatan peristiwa yang menjadi pemicu inflasi pada Triwulan IV tahun 2024

- Desember 2024 : Musim libur sekolah, perayaan Natal 2024, dan Tahun Baru 2024 mendorong kenaikan harga komoditas pangan dan transportasi.

#### **3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.**

#### **PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH**

Pelaksanaan Program Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Bungo pada triwulan I,II,III,IV 2024 sebagai berikut :

- Operasi Pasar bekerja sama dengan Bulog dan Disperindag Kabupaten Bungo menjual minyak goreng dan gula pasir di bawah harga pasaran. Operasi pasar ini juga diselenggarakan untuk membantu meringankan beban masyarakat.
- Mengikuti Rapat Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Rapat Tim Satgas Pangan
- Tim Satgas melaksanakan monitoring data informasi harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis lainnya yang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk memperoleh data harga pasar sesuai dengan komoditi di sektor perdagangan, agar dapat mengetahui fluktuasi harga untuk selanjutnya dievaluasi dalam mencari faktor-

faktor penyebab dan mencari solusi pemecahannya.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

### **EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH**

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bungo pada triwulan I,II,III,IV 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Bungo dan koordinasi dengan TPID Provinsi Jambi dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan di Kabupaten Bungo.
2. Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi serta indikasi surplus devisa pangan di masing-masing daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

### **REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH**

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bungo pada triwulan I,II,III, IV 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan serta kelancaran distribusi yang berkelanjutan.
2. Melanjutkan program integrasi pertanian terpadu secara berkesinambungan untuk meningkatkan produksi pangan.
3. Melanjutkan dan meningkatkan koordinasi antar anggota TPID untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga.